

Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Wan Kesturi Annisa Muharrani^{1*}, Zahrah Safilzah Sinaga²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif hampir diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya sektor kesehatan saja yang terganggu namun juga semua sektor lainnya seperti ekonomi, pertanian, transportasi, sosial, dll. Pada triwulan kedua tahun 2020 negara-negara modern seperti Amerika, Singapura, Jerman, Perancis dan Italia sudah memasuki resesi. Tpatnya pada bulan maret Indonesia dihebohkan oleh salah satu fenomena yaitu pandemic covid-19. Sampai dengan bulan agustus 2020, total kasus di Indonesia 165.887 dengan 7.169 kematian di 34 provinsi. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus covid-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat akan berdampak pada penurunan perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. 2) Dampak wabah covid-19 terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Covid-19; Kebijakan

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a negative impact on almost everyone in the world, including Indonesia. Not only the health sector was disrupted but also all other sectors such as the economy, agriculture, transportation, social services, etc. In the second quarter of 2020, modern countries such as America, Singapore, Germany, France, and Italy will have entered a recession. In March, Indonesia was shocked by one of the phenomena, namely the COVID-19 pandemic. As of August 2020, the total number of cases in Indonesia was 165,887, with 7,169 deaths in 34 provinces. The rapid spread and increase in the number of COVID-19 cases will have an impact on the decline in the Indonesian economy. This study aims to determine: 1) the impact of the COVID-19 pandemic on the economic growth of North Sumatra Province. 2) The impact of the COVID-19 outbreak on the unemployment rate in North Sumatra Province

Keywords: *economic growth; COVID-19; policy*

PENDAHULUAN

Diakhir tahun 2019 muncul suatu fenomena dunia yang dinamakan Corona Virus. Wabah pandemi ini telah menjalar ke seluruh belahan dunia yang bermula dari kota Wuhan, china. Penyebaran Covid-19 ini sangat besar dampaknya terutama dalam perekonomian, Menurut data *World Bank* dalam *Global Economic Prospect* Januari 2021 menunjukkan bahwa perekonomian dunia mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi negara-negara dengan pendapatan tinggi tercatat -5,4% pada tahun 2020, adapun pertumbuhan ekonomi Negara sedang berkembang juga mengalami penurunan hingga angka -2.3% (IMF, 2021) termasuk didalamnya Indonesia.

Menurut data *World bank* pada tahun 2020 indonesia mengalami penurunan ekonomi cukup drastis yang berada pada angka 5,0% sampai dengan 5,2% (IMF, 2021) jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dua tahun terakhir. Untuk memperbaiki perekonomian ini banyak upaya yang telah dilakukan untuk mendapatkan suatu kebijakan dari pemerintah. Ditambah lagi dengan beban fiscal yang semakin, besar akibat wabah Covid-19 yang masih belum kunjung membaik. Pemerintah memberikan kebijakan dengan munculnya Perpres No.72 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN Indonesia (Antarnews, 8 February 2021).

Landasan Teori a. Covid-19

Corona Virus 2019 (Covid-19) atau *vere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* atau dikenal dengan Covid-19 adalah jenis baru dari corona virus yang menjalar ke seluruh dunia. Virus ini bisa menular ke siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Wabah ini terkonfirmasi di Indonesia mencapai 1,1 juta jiwa dengan jumlah kematian mencapai 32.167 jiwa (covid19.go.id 10-02-2021).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara singkat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya dititikberatkan pada tiga aspek, yaitu proses, peningkatan output per kapita dan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (one shoot). Di sini dapat dilihat adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat perekonomian sebagai sesuatu yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Budiono, 1992: 1)

Pengangguran

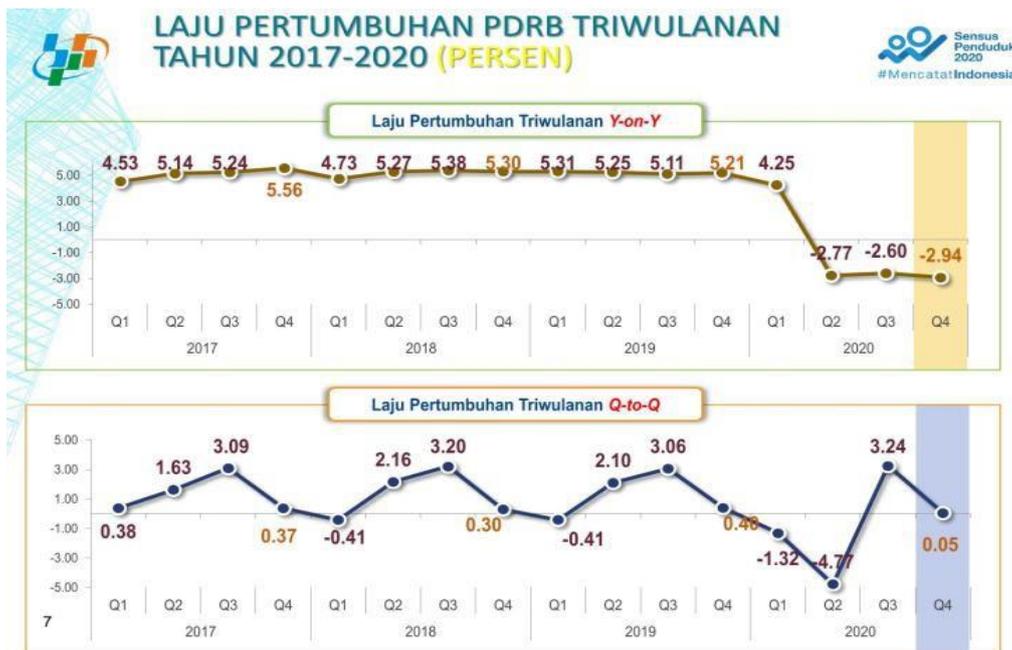
Pengangguran didefinisikan oleh Badan Pusat Statistika sebagai orang yang mencari kerja, dan merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan ataupun orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap namun belum bekerja. Salah satu penyebab kemiskinan diantaranya adalah kurangnya pendapatan. Seseorang yang masuk dalam kategori miskin yaitu jika ia memiliki pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka jika kita menyimpulkan diantara permasalahan yang menyebabkan pembangunan manusia dan kemiskinan adalah rendahnya jumlah lapangan pekerjaan. Rendahnya kebutuhan untuk tenaga kerja di Sumatera Utara ini menyebabkan pengangguran yang berdampak pada perekonomian masyarakat yang semakin rendah.

Dalam situasi pandemi saat ini sebagian perusahaan menjadikan alasan untuk melakukan pengurangan pegawai dan efisiensi, yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan kepada sebagian orang. Maka ini salah satu penyebab yang dapat memperburuk keadaan perekonomian daerah, akibat tingginya angka pengangguran dan kemiskinan maka semakin membesar beban pengeluaran pemerintah untuk mencegah salah satu dampak negatif covid-19 ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis deskriptif. Yang mana metode ini digunakan untuk menggambarkan sebuah objek dengan apa adanya. Selain itu metode ini juga bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian dengan lebih sistematis. terhadap data yang tersaji dari Badan Pusat Statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Data Pertumbuhan Ekonomi Sumut

Dampak COVID-19 terhadap perekonomian mereda. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan III 2020 tercatat -2,60% (yoy), sedikit naik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -2,77% (yoy). Pemulihan ekonomi bersumber dari pertumbuhan impor yang mengalami kontraksi lebih dalam. Persiapan Pilkada di 23 kabupaten/kota turut menopang perbaikan ekonomi dari sisi konsumsi LNPRT. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan kinerja terjadi pada LU Perdagangan dan LU Tansportasi dan Pergudangan seiring dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru.

Pemulihan ekonomi diperkirakan terus berlanjut hingga triwulan IV 2020. Prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi bersumber dari permintaan domestik. Optimalisasi belanja pemda akan mendorong konsumsi pemerintah. Di samping itu, konsumsi rumah tangga mulai pulih meski belum kembali ke fase normal sejalan dengan perbaikan penanganan kesehatan serta perayaan HBKN. Mulai pulihnya konsumsi rumah tangga akan tercermin pada perbaikan LU Perdagangan dan LU Transportasi dan Pergudangan. Secara keseluruhan tahun 2020, ekonomi Sumatera Utara akan lebih rendah dari tahun sebelumnya akibat pandemi.



Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara

Dari gambar di atas dapat kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2020 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2012 hingga 2018 Sumatera Utara mengalami peningkatan dan penuruna hingga mencapai angka 5,18% di tahun 2018. Namun pada tahun setelahnya hingga 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka -1,07%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan masalah lanjutan pula bagi masyarakat. Diantaranya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dikarenakan keadaan keuangan mereka yang memburuk sedikitnya 14.000 pekerja dari 283 perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak pandemi Covid-19. Perusahaan yang paling terdampak yakni perhotelan, pariwisata dan biro perjalanan.

Tetapi mengenai hak-hak pekerja seperti THR menyambut Hari Raya Idulfitri, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut Harianto Butarbuta meminta seluruh perusahaan dapat menjalankan aturan yang sudah digariskan pemerintah. Antara lain, perusahaan yang terkena dampak Covid-19 dapat berdialog menghasilkan kesepakatan dengan pekerja mengenai pembayaran THR. Disnaker Sumut juga mengajak seluruh pekerja yang di PHK untuk segera mendaftar Kartu Pra Kerja dari pemerintah pusat, dimana Sumut mendapat kuota sebanyak 183.904 orang. Kartu Pra Kerja ini dapat diperoleh dengan mendaftar secara online.

PEMBAHASAN

Dapat kita lihat dari sisi Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 7,51 juta orang, naik 161 ribu orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,43 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 7,04 juta orang, meningkat sebanyak 194 ribu orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,56 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,44 persen poin).

Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan masalah lanjutan pula bagi masyarakat. Diantaranya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dikarenakan keadaan keuangan mereka yang memburuk. Selain itu bagi mereka yang bekerja di sektor informal terpaksa menghentikan aktifitas kerja mereka karena aturan dan ancaman penyebaran pandemi ini. covid-19 menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka. Statemen ini didukung dengan data yang disajikan oleh BPS terjadi peningkatan persentase jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara.

Jenis Kegiatan (Kerja)	Banyaknya penduduk Sumatera Utara umur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan (Jiwa)		
	2022	2021	2020
Angkatan Kerja	7 669 870	7 511 006	7 350 057
Bekerja	7 197 374	7 035 850	6 842 252
Pengangguran	472 496	475 156	507 805
Bukan angkatan kerja	3 361 570	3 358 759	3 353 254
Tenaga kerja	11 031 440	10 869 765	10 703 311

Gambar 3. Jumlah Pengangguran Terbuka Sumut
Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tabel diatas menunjukkan jumlah pengangguran terbuka Sumut dari tahun 2020 hingga 2022. Jumlah pengangguran mengalami Peningkatan pada 2020 sebanyak 507,805 Jiwa, turun 475,156 Jiwa dibandingkan dengan tahun 2020. Dimana hal ini terjadi setelah pandemic covid-19 masuk ke daerah. secara tidak langsung nantinya pengangguran ini akan menyebabkan masalah baru bagi Masyarakat

terutama meningkatnya jumlah masyarakat miskin disebabkan hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat. Dan ini pun telah terlihat dari data yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistika Provinsi Sumatera Utara:

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Sep'21	Mar'22	Sep'21	Mar'22	Sep'21	Mar'22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	10,58	10,31	18,04	16,87	15,53	14,64
2. Sumatera Utara	8,68	8,76	8,26	7,98	8,49	8,42
3. Sumatera Barat	4,83	4,95	7,23	6,86	6,04	5,92
4. Riau	6,72	6,34	7,19	7,08	7,00	6,78
5. Jambi	10,50	10,51	6,28	6,19	7,67	7,62
6. Sumatera Selatan	11,99	11,23	13,28	12,31	12,79	11,90
7. Bengkulu	14,73	14,88	14,28	14,49	14,43	14,62
8. Lampung	8,50	8,31	13,18	13,14	11,67	11,57
9. Kep. Bangka Belitung	3,22	3,09	6,57	6,26	4,67	4,45
10. Kepulauan Riau	5,37	5,68	10,45	10,68	5,75	6,24

Dapat kita lihat bahwa jumlah kemiskinan mengalami peningkatan sejak maret 2021 sebesar 0,10% lebih tinggi dari September 2019. Bersamaan dengan kemunculan virus corona di Indonesia jumlah masyarakat miskin di Provinsi Sumatera selatan pun meningkat hingga akhir 2020 sebesar 0,32% dari jumlah sebelumnya.

Persentase penduduk miskin Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,52 poin yaitu dari 9,01 persen pada Maret 2021 menjadi 8,49 persen pada September 2021. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021, atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Persentase penduduk miskin pada September 2021 di daerah perkotaan sebesar 8,68 persen, dan di daerah pedesaan sebesar 8,26 persen. Daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,47 poin, sedangkan daerah pedesaan berkurang sebesar 0,58 poin jika dibandingkan Maret 2021. Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp 537.310,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp404.860,00 (75,35%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp132.451,00 (24,65%).

Pada periode Maret 2021–September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan penurunan dan sebaliknya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan sedikit peningkatan. P1 turun dari 1,522 pada Maret 2021 menjadi 1,450 pada September 2021, dan P2 naik dari 0,376 menjadi 0,382. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung meningkat dan semakin mendekati garis kemiskinan, penurunan kedalaman kemiskinan ini juga terjadi pada Maret 2021 lalu. Keadaan sebaliknya pada tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin sedikit meningkat, dimana pada periode Maret 2021 sempat menurun.

SIMPULAN

Simpulan dapat bersifat generalisasi temuan sesuai permasalahan penelitian, dapat pula berupa rekomendatif untuk langkah selanjutnya. Untuk memperbaiki perekonomian ini banyak upaya yang telah dilakukan untuk mendapatkan suatu kebijakan dari pemerintah. Ditambah lagi dengan beban fiscal yang semakin, besar akibat wabah Covid-19 yang masih belum kunjung membaik. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan masalah lanjutan pula bagi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung meningkat dan semakin mendekati garis kemiskinan, penurunan kedalaman kemiskinan ini juga terjadi pada Maret 2021 lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Khakim, L., Hermawan, I., Solechan, A., & PS, V. T. (2011). Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(2), 281. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i2.199>
- BPS. 2021. Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2021
- Drs. Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D. (2015). *Teori Pertumbuhan*
- Budiono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: PBF